



Judul : Tak Taat Menjelang Pemilu
Tanggal : Rabu, 30 Januari 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 2

Tak Taat Menjelang Pemilu

KOMISI Pemberantasan Korupsi merilis data yang menunjukkan merosotnya tingkat kepatuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hingga akhir Januari 2019, KPK mencatat hanya 21,42 persen atau 115 anggota DPR yang melaporkan harta kekayaan pada 2018. LHKPN tersebut berisi perubahan harta kekayaan mereka pada 2017.

Berdasarkan data situs LHKPN KPK

Tahun 2017

(HARTA KEKAYAAN TAHUN 2016)

Wajib Lapör : 512 orang
Daftar Online : 34 orang
Daftar Offline : 478 orang
Sudah Lapör : 496 orang
Belum Lapör : 16 orang
Tingkat Patuh :

96,88 %

Tahun 2018

(HARTA KEKAYAAN TAHUN 2017)

Wajib Lapör : 537 orang
Daftar Online : 343 orang
Daftar Offline : 194 orang
Sudah Lapör : 115 orang
Belum Lapör : 422 orang
Tingkat Patuh :

21,42 %

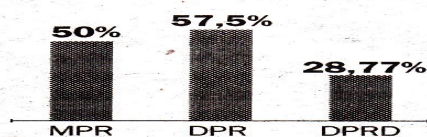
Berdasarkan asal Partai Politik

Partai Persatuan Pembangunan	32,43%
Partai Demokrat	30,51%
Partai Keadilan Sejahtera	26,32%
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24,77%
Partai Golkar	22,83%
Partai Gerindra	20,63%
Partai Amanat Nasional	15%
Partai NasDem	9,09%
Partai Kebangkitan Bangsa	4,76%
Partai Hanura	0%

Perbandingan dengan Lembaga Legislatif Lain

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Wajib Lapör : 2 orang
Sudah Lapör : 1 orang
Tingkat : 50 persen



DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Wajib Lapör : 80 orang
Sudah Lapör : 46 orang
Tingkat : 57,5 persen

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Wajib Lapör : 15.229 orang
Sudah Lapör : 4.381 orang
Tingkat : 28,77 persen

● FRANCISCO ROSARIANS